

## **Analisis Pengaruh Utang terhadap Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia Periode 1949-2017**

**Dedi Junaedi**

IAI Nasional Laa Roiba Bogor  
[dedijunaedi@gmail.com](mailto:dedijunaedi@gmail.com)

**Muhammad Rizal Arsyad**

Universitas Gunadarma  
[aarsyad.staff@gunadarma.ac.id](mailto:aarsyad.staff@gunadarma.ac.id)

### **ABSTRACT**

Since independence, Indonesia has experienced seven changes of national leadership. Starting from Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), to Joko Widodo. During that time, foreign debt is always present to patch the development budget deficit. Debt is expected to move the wheels of the economy, create growth, create jobs, and alleviate poverty. This study aims to analyze the effect of debt, inflation and government regime differences on economic growth and poverty levels in Indonesia, from the Old Order era, the New Order, to the Reform Order. The study used secondary data obtained from Bank Indonesia, the National Development Planning Agency (Bappenas), the Central Bureau of Statistics (BPS), the World Bank, and other reference sources such as books, journals and scientific papers. The data used are the value of foreign debt, national income (Gross Domestic Product / GDP), population, number and ratio of the poor, inflation rate in the period 1949 - 2017. The results of multiple regression analysis with dummy variable (using Eviews 10 application program) show the following results: Foreign debt has correlation with the national economic condition, in particular the value of Indonesian Gross Domestic Product and the level of poverty. Debt tends to increase the value of GDP and reduce poverty. In terms of debt governance as a driver of the economy and poverty, the Suharto and Habibie Era tend to be different and better than the Sukarno Era. While the debt management of Era Abdurrahman Wahid, Era Megawati, Era SBY and Era Jokowi no different or no better than Era Sukarno. Although nationally can increase GDP and reduce poverty, debt can not improve people's prosperity (read per capita income). Foreign debt even tends to reduce the level of welfare of the people. This applies to all government regimes.

**Keywords: Debt, Development, GDP, Income, Inflation, Indonesia, Poverty**

### **ABSTRAK**

Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepemimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo. Selama itu pula, utang luar negeri selalu hadir untuk menambal defisit anggaran pembangunan. Utang diharapkan ikut menggerakkan roda perekonomian, menciptakan pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh utang, inflasi dan perbedaan rejim pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia, mulai era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan sumber-sumber referensi lain seperti buku, jurnal maupun makalah ilmiah. Data yang dipakai adalah nilai utang luar negeri, pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto/PDB), populasi jumlah dan rasio penduduk miskin, tingkat inflasi pada periode 1949 - 2017. Hasil analisis regresi ganda dengan dummy variable (menggunakan program aplikasi Eviews 10) menunjukkan hasil sebagai berikut: Utang luar negeri memiliki korelasi dengan kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai Produksi Domestik Bruto Indonesia dan tingkat kemiskinan. Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam hal tata kelola utang sebagai

pendorong perekonomian dan kemiskinan, Era Soeharto dan Era Habibie cenderung berbeda dan lebih baik dari Era Soekarno. Sementara tatakelola utang Era Abdurrahman wahid, Era Megawati, Era SBY dan Era Jokowi tidak berbeda atau tidak lebih baik dari Era Soekarno. Meski secara nasional dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (baca pendapatan perkapita). Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan.

**Kata Kunci: Inflasi, Indonesia, Kemiskinan, PDB, Pembangunan, Pendapatan, Utang**

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan untuk perbaikan ekonomi sebuah negara. Indonesia, sebagai negara sedang berkernbang, memiliki kendala dalam mewujudkan program-program pembangunan untuk kernal- muran nasional. Pemerintah menghadapi masalah keterbatasan modal untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan penerimaan dan pengeluaran atau adanya desifit anggaran pembangunan.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan terse but, Pemerintah Indonesia nelakukan serangkaian kebijakan baik berupa stimulus dari dalam uegeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal), Selain menggenjot sumber- sumber penerimaan negara melalui ektensifikasi dan intensifikasi pajak dan non pajak, pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah menerapkan kebijakan utang luar negeri dan penanaman modal asing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sementara secara etimologi, utang atau debt (Inggris) berasal dari istilah Bahasa Perancis dette atau istilah Bahasa Latin debitum yang bermakna "yang berutang." Istilah debitur konon pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-13<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> "Debt". [www.etymonline.com](http://www.etymonline.com). *Online Etymology Dictionary*. Retrieved 20 May 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan pinjaman sebagai utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan Pinjaman Luar Negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain (bilateral) atau (multilateral) yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi, menutup saving-investment gap dan foreign exchange gap yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas (No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/ KET/5/1995) Pinjaman Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Orang, perusahaan maupun negara secara kelembagaan tak pernah lepas dari praktik utang-piutang. Tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Secara bisnis, utang sudah dianggap hal yang lazim untuk menambah modal usaha. Hal yang serupa terjadi dalam tata kelola suatu negara. Hampir semua negara, pernah bahkan terus berutang untuk menambah dana atau modal pembangunan nasionalnya. Indonesia, sebagai negara berkembang, punya sejarah panjang dalam hal utang atau pinjaman ke pihak luar, baik secara bilateral maupun multilateral lewat lembaga keuangan internasional dan regional.

Menurut Lincolin Arsyad (2010), utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai deficit anggaran.<sup>31</sup> Pertumbuhan yang tercipta pada gilirannya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Indonesia, sendiri, sudah lama mengenal utang luar negeri. Bahkan sebelum merdeka, sudah ada warisan utang dari peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dari tahun ke tahun, utang luar negeri kita bertambah. Ini berlaku mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi sekarang. Pada awal kemerdekaan, Indonesia punya utang sekitar 2 milyar dolar. Kini, per Semester II 2017, utang Indonesia sudah mendekati nilai Rp 4.000 trilyun. Perkembangan utang luar negeri Indonesia dalam dolar dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Grafik 1.

Tabel 1. Perkembangan Utang RI Periode 1949 - 2017

Tahun	Utang (Juta \$)	Tahun	Utang (Juta\$)	Tahun	Utang (Juta\$)
1949	0.79	1987	12.1088	2006	132.63

<sup>3</sup> Lincolin Arsyad dalam *Ekonomi Pembangunan (2010)*.

1950	0.514	1990	15.9421	2007	141.18
1956	0.618	1993	20.1768	2008	155.08
1963	1.7	1996	24.987	2009	172.87
1966	2.015	1998	68.7	2010	202.41
1969	2.437	1999	132.2	2011	225.17
1972	3.617	2000	129.3	2012	252.37
1976	8.295	2001	122.3	2013	266.11
1978	11.33	2002	136.9	2014	293.33
1980	12.994	2003	135.4	2015	310.73
1981	13.945	2004	141.27	2016	317.09
1984	16.8867	2005	134.5	2017	357.5

Sumber: BPS, BI, World Bank dan publikasi lainnya

Secara normatif, setiap utang luar negeri digunakan Indonesia untuk belanja pembangunan. Harapannya, ikut membiayai berbagai proyek pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terindikasi dengan naiknya nilai PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan.

Dalam praktiknya, utang luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk belanja pembangunan. Sebagian utang malah dipakai untuk menutup cicilan utang pokok dan bunganya. Penelitian Hernatasa (2004) menemukan adanya Fisher Paradox, situasi dimana semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan, semakin besar akumulasi utang luar negerinya<sup>4</sup>. Kondisi serupa dikemukakan oleh peneliti lain bahwa cicilan plus bunga utang luar negeri secara substansial dibiayai oleh utang baru sehingga terjadi net transfer sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak pihak kreditur asing (Swasono dan Arief, 1999).

Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan. Hal ini karena sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian ternyata tersedot oleh pengeluaran rutin yang sebagian besar teralokasi pada cicilan pokok dan bunga utang. Utang yang sasaran utamanya untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi beban pemerintah saat melakukan pembayaran utang tersebut. Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri berpengaruh terhadap perekonomian karena pada kondisi tertentu pembayaran cicilan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian sehingga menghilangkan kontribusi positif dari utang luar negeri.

<sup>4</sup>Hernatasa dalam *Analisis Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi* (Tesis, IPB, 2004).

Utang luar negeri diperlukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dengan cara meningkatkan produksi (PDB), memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki neraca pembayaran. Namun, apabila utang digunakan secara tidak wajar maka kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan mengancam kestabilan makroekonomi negara.

Kondisi yang memprihatinkan utang luar negeri Indonesia baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya tentu tidak lepas dari kondisi perekonomian sebelumnya. Dengan kata lain, buruknya kinerja perekonomian di tahun-tahun sebelumnya bisa jadi sebagai pendorong munculnya masalah utang luar negeri dewasa ini.

#### RUMUSAN MASALAH

Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepemimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo. Selama itu pula, utang luar negeri selalu hadir untuk menambal deficit anggaran pembangunan. Bagaimana mereka mengelola utang luar negeri dalam konteks pembangunan, yakni mengerakkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menarik untuk dikaji. Bagaimana hubungannya antara Utang dengan PDB dan tingkat kemiskinan?

Kajian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Indonesia?

2. Bagaimana perbandingan pengelolaan utang secara antara periode pemerintahan Indonesia mulai era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi.

Sementara, tujuan penelitiannya adalah;

1. Menganalisis signifikansi pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia

2. Menganalisis perbedaan pengelolaan utang secara relatif antara periode pemerintahan Indonesia mulai era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan sumber-sumber referensi

lain dalam bentuk buku, jurnal maupun publikasi lainnya. Data yang dikumpulkan berupa data utang luar negeri, data Produk Domestik Bruto (PDB), data pendapatan nasional, data populasi, data jumlah dan rasio penduduk

miskin, tingkat inflasi dan lain-lain. Data tersebut berupa data time series dari periode 1949-2017.

Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat adalah jumlah penduduk miskin dan nilai PDB (US\$). Sedang variabel bebas adalah ada sembilan, yaitu jumlah utang (US\$), jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan variable dummy periode pemerintahan dengan era Pemerintah Jokowi sebagai pembandingan atau rujukannya.

Data olahan dianalisis secara kuantitatif deskriptif dengan model regresi berganda dengan dummy variable. Pengaruh utang terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dapat diketahui dengan mengajukan Model Ekonometrika (PDB dan MISKIN) sebagai berikut:

$$PDB = \beta_0 + \beta_1 \text{Utang} + \beta_2 \text{Penduduk} + \beta_3 \text{Inflasi} + \beta_4 \text{Era1} + \beta_5 \text{Era2} + \beta_6 \text{Era3} + \beta_7 \text{Era4} + \beta_8 \text{Era5} + \beta_9 \text{Era6} + \epsilon$$

$$\text{MISKIN} = \beta_0 + \beta_1 \text{Utang/PDB} + \beta_2 \text{Penduduk} + \beta_3 \text{Inflasi} + \beta_4 \text{PDB} + \beta_5 \text{Era1} + \beta_6 \text{Era2} + \beta_7 \text{Era3} + \beta_8 \text{Era4} + \beta_9 \text{Era5} + \beta_{10} \text{Era6} + \epsilon$$

PDB adalah variabel nilai produk domestic bruto tahunan. Miskin merupakan variable angka kemiskinan (dinyatakan dalam jumlah penduduk atau rasio penduduk miskin dibanding jumlah penduduk Indo esia); Utang adalah indikator utang luar negeri dinyatakan dalam satuan persen. Populasi adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun berjalan. Inflasi adalah tingkat inflasi tahunan.

Untuk melihat perbandingan pengelolaan utang dalam setiap era pemerintahan, dibuat enam dummy variable, yaitu; Era1 (membandingkan Era Orde Lama dengan Era Jokowi); Era2 (membandingkan Era Orde Baru dengan Era Jokowi); Era3 (membandingkan Era Habibie dengan Era Jokowi); Era4 (membandingkan Era Abdurrahman Wahid dengan Era Jokowi); Era5 (membandingkan Era Megawati dengan Era Jokowi), dan Era6 (membandingkan Era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Era Jokowi).

Sesuai pertanyaan penelitian, kajian ini memiliki dua hipotesis, yaitu:

H<sub>01</sub> utang, populasi, inlasi dan era tidak berpengaruh terhadap PDB H<sub>11</sub> utang, populasi, inlasi dan era berpengaruh terhadap PDB

H<sub>02</sub> utang, populasi, inlasi, PDB dan era tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

H<sub>12</sub> utang, populasi, inlasi, PDB dan era tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelusuran, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan secara lengkap. Terutama menyangkut data jumlah utang, nilai PDB,

inflasi dan jumlah penduduk miskin. Dari berbagai sumber berikut adalah rekapitulasi data yang berhasil dikumpulkan penulis.

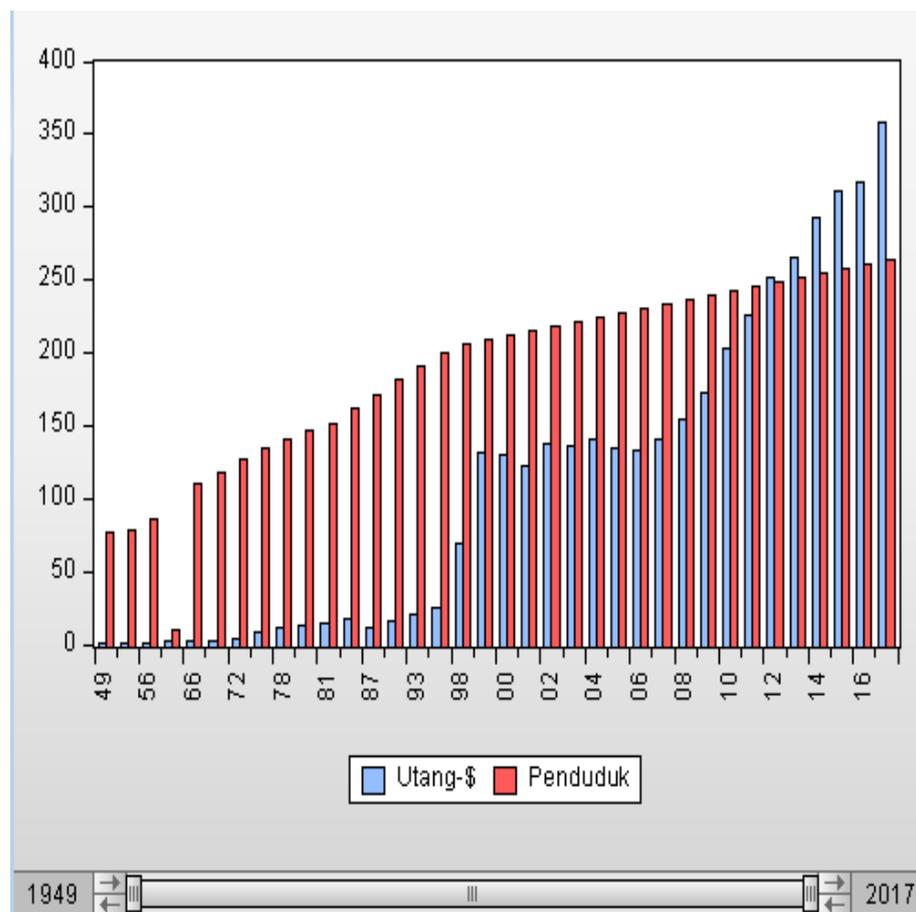
Tabel 2. Data Utang, PDB, Populasi, Inflasi dan Angka Kemiskinan 1949-2017

Tahun	Utang (Juta\$)	PDB (Juta\$)	Populasi	Inflasi	Miskin (Juta Orang)	Era
1949	0.79	1.71	76948780	11	58.1	Soekarno
1950	0.514	1.78	78255665	10	57.1	Soekarno
1956	0.618	1.837	86002245	22	56.3	Soekarno
1963	1.7	1.2445	10155665	30	61	Soekarno
1966	2.015	1.6158	109593000	190	53	Soekarno
1969	2.437	2.593	118054000	9.9	47.5	Soeharto
1972	3.617	3.195	127466839	5.6	44.5	Soeharto
1976	8.295	37.269	134010690	5.8	53.6	Soeharto
1978	11.33	51.456	140665856	7.7	47.2	Soeharto
1980	12.994	72.482	147490365	13.5	42.3	Soeharto
1981	13.945	85.518	150978840	10.4	40.6	Soeharto
1984	16.8867	84.854	161555583	8.05	35.00	Soeharto
1987	12.1088	75.93	171728917	15.44	30	Soeharto
1990	15.9421	106.141	181436821	7.72	27.2	Soeharto
1993	20.1768	158.007	190879523	8.88	25.9	Soeharto
1996	24.987	227.37	199914831	8.85	34	Soeharto
1998	68.7	95.446	205715544	77.6	49.5	Habibie
1999	132.2	140.001	208612556	2	37.3	Habibie
2000	129.3	165.021	211540429	9.4	38.74	A. Wahid
2001	122.3	160.447	214506502	12.55	37.87	A. Wahid
2002	136.9	195.661	217508059	10.03	38.39	Megawati
2003	135.4	234.772	220545214	5.16	37.34	Megawati
2004	141.27	256.837	223614649	6.4	36.15	Susilo BY
2005	134.5	285.869	226712730	17.11	35.1	Susilo BY
2006	132.63	364.571	229838202	6.6	39.4	Susilo BY
2007	141.18	432.217	232989141	6.59	37.17	Susilo BY
2008	155.08	510.229	236159276	11.06	34.96	Susilo BY
2009	172.87	539.58	239340478	2.78	32.53	Susilo BY
2010	202.41	755.094	242524123	6.96	31.02	Susilo BY
2011	225.17	892.969	245707511	3.79	30.12	Susilo BY
2012	252.37	917.87	248883232	4.3	29.25	Susilo BY
2013	266.11	912.524	252032263	8.4	28.17	Susilo BY
2014	293.33	890.815	255131116	8.4	28.28	Susilo BY

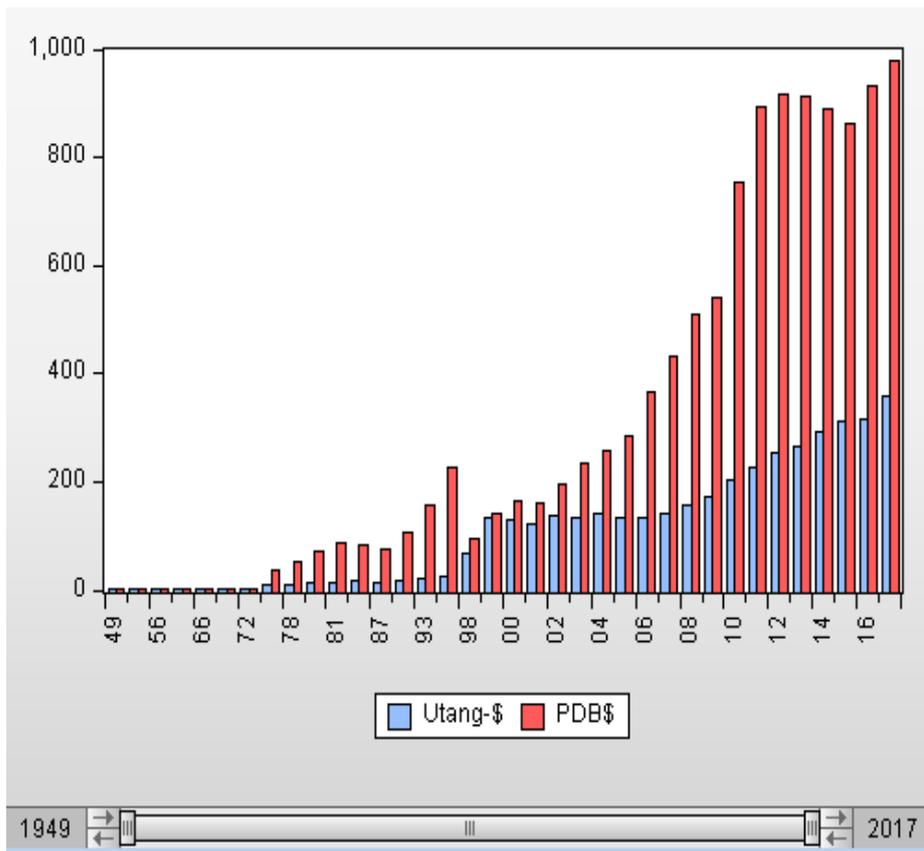
2015	310.73	861.256	258162113	3.4	28.59	Jokowi
2016	317.09	932.259	261115456	3	28.01	Jokowi
2017	357.5	978.872	264102584	4.3	27.77	Jokowi

Sumber: BPS, BI, Bappenas dan Rujukan lain diolah

Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepemimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY, hingga Jokowi. Dari tabel dan grafis terlihat bahwa jumlah utang dan PDB cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, pada semua periode pemerintahan. Pengecualian terjadi pada era Pemerintahan Abdurahman Wahid dimana pada masanya secara akumulatif ada penurunan jumlah utang luar negeri Indonesia.

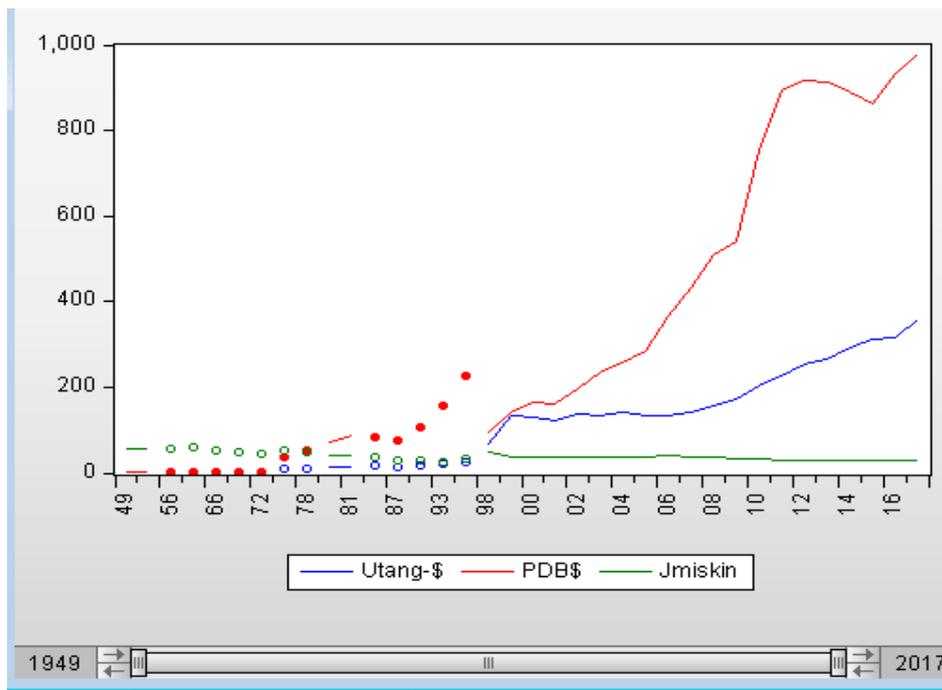


Grafik 1 Perkembangan Utang Indonesia 1949-2017



Grafik 2 Perkembangan Utang dan PDB Indonesia 1949-2017

Sementara itu, jumlah kemiskinan meski cenderung turun, faktanya selalu ada dinamika turun naik antarperiode pemerintahan. Akibat tekanan krisis moneter dan ekonomi pada 1997/1998 jumlah PDB Indonesia sempat anjlok pada era Pemerintahan Habibie, atau tepatnya era transisi dari Era Orde Baru ke Orde Reformasi..



Grafik 3 Perkembangan Utang, PDB dan Angka Kemiskinan Indonesia

Bagaimana pengaruh utang terhadap pertumbuhan PDB dan kemiskinan, dilakukan dua tahap analisis data times seris. Tahap pertama untuk melihat signifikansi pengaruh utang terhadap dinamika jumlah PDB pada setiap era pemerintahan. Sementara tahap kedua untuk melihat pengaruh pengelolaan utang terhadap penurunan angka kemiskinan. Semua data diolah menggunakan analisa statistik Eviews.

Hasil analisis statistik tahap pertama diperoleh hasil sebagai mana tercantum dalam Tabel 2 Hasil Regresi Berganda Pengaruh Utang terhadap PDB.

Tabel 3 Hasil Analisis Faktor yang Mempengaruhi Nilai PDB (Eviews 10)

Dependent Variable: PDB\$  
 Method: Least Squares  
 Date: 03/20/18 Time: 15:00  
 Sample: 1949 2017  
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UTANG_\$	3.603438	0.348583	10.33740	0.0000
INFLASI	-0.038513	0.395105	-0.097476	0.9231
PENDUDUK	0.971183	0.586063	1.657130	0.1095
ERA1	442.3385	138.2355	3.199892	0.0036
ERA2	396.4813	112.1160	3.536349	0.0015
ERA3	68.94532	92.96502	0.741626	0.4650
ERA4	15.80797	86.11714	0.183564	0.8558
ERA5	31.25757	79.34751	0.393933	0.6968
ERA6	217.4130	58.49557	3.716743	0.0010
C	-512.8485	158.4234	-3.237201	0.0033
R-squared	0.976461	Mean dependent var	317.6476	
Adjusted R-squared	0.968313	S.D. dependent var	341.6123	
S.E. of regression	60.80956	Akaike info criterion	11.28350	
Sum squared resid	96142.86	Schwarz criterion	11.72337	
Log likelihood	-193.1031	Hannan-Quinn criter.	11.43703	
F-statistic	119.8406	Durbin-Watson stat	1.659283	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pada tingkat kepercayaan 95% (tingkat error  $\alpha$  5%), nilai Utang (dalam jutaan US\$) dan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah PDB (dalam jutaan US\$). Sedang tingkat inflasi ternyata tidak berpengaruh nyata. Sementara itu, dari analisis variabel dummy diperoleh data statistik bahwa pengelolaan utang terkait PDB era Pemerintahan Jokowi berbeda nyata dengan tata kelola utang era Soekarno, Soeharto, dan era SBY. Tanda positif menunjukkan bahwa tata kelola utang luar negeri Indonesia era Orde Lama, Orde Baru dan Orde SBY relatif lebih baik dibanding era Jokowi. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan era Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, tata kelola utang LN Indonesia kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi atau PDB ternyata tidak berbeda nyata. Model ekonometrika pengaruh Utang terhadap PDB adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{PDB} = & - 512,8485 + 3,6034\text{Utang} - 0,0385\text{Inflasi} + 0,9712\text{Penduduk} \\
 & + 438,6831\text{Era1} + 394,6831\text{Era2} + 68,9453\text{Era3} + 15.8079\text{Era4} + 31.2576\text{Era5} \\
 & + 217,4130\text{Era6}
 \end{aligned}$$

R<sup>2</sup> dari regresi 0,9765, artinya variabel utang, penduduk dan tata kelola era pemerintahan dapat menjelaskan dinamika perubahan nilai ominal PDB sekitar 97,65%. Ini juga menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara utang dan PDB. Tanda konstanta negative menunjukkan bahwa jika tidak ada utang, maka ada kecenderungan PDB nasional atau pertumbuhan ekonomi negatif.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Hernatasa (2004), bahwa utang luar negeri memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai titik kritis yang merupakan keadaan dimana utang luar negeri mulai memiliki dampak marginal yang negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi yaitu pada saat indikator debt/GDP sebesar 55.097 persen.

Selanjutnya, bagaimana pengaruh utang terhadap upaya pengentasan kemiskinan? Untuk menjawabnya dapat dilihat dari hasil analisis Eviews tahap kedua dengan variabel terikat JMiskin dan variabel bebas rasio Utang/PDB, PDBkapita, Penduduk, Inflasi, Era1, Era2, Era3, Era4, Era5, dan Era6. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Eviews 10)

Dependent Variable: JMISKIN  
 Method: Least Squares  
 Date: 03/20/18 Time: 15:28  
 Sample: 1949 2017  
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UTANG_PDB	-10.26827	3.525473	-2.912593	0.0073
INFLASI	0.090615	0.029383	3.083915	0.0048
PENDUDUK	-0.322048	0.046284	-6.958091	0.0000
ERA1	-32.36297	9.119436	-3.548791	0.0015
ERA2	-23.64999	5.526612	-4.279293	0.0002
ERA3	-0.490827	3.993754	-0.122899	0.9031
ERA4	-1.694066	3.666612	-0.462025	0.6479
ERA5	-1.622298	3.267895	-0.496435	0.6238
ERA6	-2.754365	2.612523	-1.054293	0.3014
C	115.5446	13.11187	8.812214	0.0000
R-squared	0.904708	Mean dependent var	38.86000	
Adjusted R-squared	0.871723	S.D. dependent var	10.03979	
S.E. of regression	3.595830	Akaike info criterion	5.627560	
Sum squared resid	336.1798	Schwarz criterion	6.067426	
Log likelihood	-91.29608	Hannan-Quinn criter.	5.781085	
F-statistic	27.42742	Durbin-Watson stat	1.276985	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari data Tabel 4 diperoleh informasi bahwa variabel Utang\_PDB, Penduduk, Inflasi, Era1, Era2, dan Era6 berpengaruh nyata terhadap variabel terikat JMiskin

dengan  $R^2$  0,9099. Rasio Utang/PDB dan Penduduk berkorelasi negative dengan JMiskin, sementara Inflasi berkorelasi positif dengan JMiskin. Maknanya, semakin besar rasio Utang/PDB akan semakin banyak menurunkan angka kemiskinan. Demikian pula dengan jumlah penduduk, makin banyak jumlah penduduk akan semakin berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sementara pengaruh inflasi sebaliknya. Semakin tinggi inflasi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin; semakin rendah inflasi akan semakin sedikit tekanan terhadap angka kemiskinan

Hasil analisis statistik dengan dummy variabel tata kelola pemerintahan juga menunjukkan bahwa secara statistic tata kelola utang terhadap upaya pengentasan kemiskinan era Jokowi berbeda nyata dengan tata kelola utang pada Era Soekarno, Era Soeharto dan Era SBY. Tanda negatif menunjukkan tata kelola utang masa Jokowi tidak lebih baik dari Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde SBY. Sebaliknya dibanding Era Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, tata kelola Era Jokowi tidak berbeda nyata.

Berdasarkan data di atas, model ekonometrika pengaruh utang terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$JMiskin = 97,9184 - 12,4997Utang\_PDB - 0.2059Penduduk + 2.5598Inflasi - 26.3746Era1 - 25.6040Era2 - 6.4299Era3 - 8.2427Era4 - 7.1793Era5 - 5,3428Era6.$$

$R^2$  dari regresi 0,8937, artinya variabel Utang/PDB, Penduduk, Inflasi dan tata kelola era pemerintahan dapat menjelaskan dinamika perubahan nilai nominal PDB sekitar 89,37%. Ini juga menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara Utang/PDB, Penduduk dan Inflasi, serta Era1, Era2 dan Era3. Tanda konstanta positif menunjukkan bahwa jika tidak ada Utang/PDB, penduduk sedikit dan inflasi rendah, maka ada kecenderungan jumlah penduduk miskin bertambah.

Mengapa tata kelola utang era Jokowi berbeda dari era Soekarno, Soeharto dan SBY berbeda? Ini kajian menarik. Pada Era Soekarno, utang dikelola secara hati-hati digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan biaya pembangunan yang tak bisa ditutup oleh penerimaan dalam negeri. Pada Era Soeharto, utang luar negeri sepenuhnya digunakan untuk belanja pembangunan. Prosedur dan pengelolaan dengan disiplin anggaran yang ketat dan berimbang. Pada Era SBY, utang luar negeri dikelola dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Lantas apa bedanya dengan Era Jokowi. Di era ini, selain untuk menambal defisit anggaran, utang juga dilalokasikan untuk menuup cicilan utang pokok dan bunganya. Alokasi penggunaan utang terindikasi tidak disiplin. Buktinya, Menteri Keuangan dan Bappenas gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR yang meminta data rinci utang luar negeri dipakai untuk apa saja. Pada beberapa kesempatan, Menkeu Sri Mulyani juga mengakui Indonesia menambah utang baru antara lain untuk menutup cicilan utang. Jadi utang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan yang benar-benar berdampak pada pertumbuhan produksi, roda perekonomian dan program pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, ada pos alokasi yang tidaksesuai dengan hakikat tujuan pembangunan.

Selain itu, dana hasil utang digunakan untuk antara lain pembangunan infrasruktur yang tidak banyak berdampak langsung pada perekonomian nasional

Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat dalam negeri, sebagian proyek padat karya justru banyak melibatkan tenaga kerja asing. Dalam tiga tahun terakhir, banyak media melansir derasnya arus masuk tenaga kerja asal China masuk Indonesia. Maka, logis jika pembangunan yang di antaranya dibiayai utang luar negeri tidak terlalu besar dampaknya bagi upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan Indonesia.

Secara teoritis, menurut Umar Juoro (1994), pada tahun 1950 dan 1960-an, dalam semangat duet ekonomi Harrod-Domar, bantuan luar negeri dipandang mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Sampai di situ, secara teori, bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (multiplier effects) yang positif pada perekonomian.

Data hasil analisis faktor pada Tabel 5 menunjukkan hasil yang agak berbeda. Angka kemiskinan dipengaruhi secara nyata oleh variabel utang perkapita, jumlah penduduk, tata kelola utang Era Soeharto dan Era Habibie. Sementara variabel inflasi, tata kelola utang era Abdurrahman Wahid,

Megawati, SBY dan Jokowi tidak berdampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, tata kelola utang Era Soeharto dan Era Habibie lebih baik –dalam arti terbukti secara empiris dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia- dibanding regim lainnya yang pernah memegang tampuk pemerintahan di Indonesia. Tata kelola utang pada ke-4 era tersebut tidak berbeda dengan tata kelola utang Era Soekarno.

Tabel 5 Analisis Pengaruh Utang Perkapita terhadap Kemiskinan

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: JMISKIN									
Method: Least Squares									
Date: 03/20/18 Time: 14:03									
Sample: 1949 2017									
Included observations: 36									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
UTANG\$KAPITA	-12.49967	5.639609	-2.216407	0.0356					
PENDUDUK	-0.205921	0.035298	-5.833787	0.0000					
INFLASI01	2.559786	2.469559	1.036536	0.3095					
ERA1	-26.37462	8.913526	-2.958944	0.0065					
ERA2	-25.60399	7.177086	-3.567463	0.0014					
ERA3	-6.429859	5.549028	-1.158736	0.2571					
ERA4	-8.244771	5.076502	-1.624105	0.1164					
ERA5	-7.179349	4.665452	-1.538833	0.1359					
ERA6	-5.342822	3.478381	-1.536008	0.1366					
C	97.51835	10.33732	9.433621	0.0000					
R-squared	0.893701	Mean dependent var	38.86000						
Adjusted R-squared	0.856905	S.D. dependent var	10.03979						
S.E. of regression	3.797835	Akaike info criterion	5.736873						
Sum squared resid	375.0124	Schwarz criterion	6.176739						
Log likelihood	-93.26371	Hannan-Quinn criter.	5.890398						
F-statistic	24.28816	Durbin-Watson stat	1.389031						
Prob(F-statistic)	0.000000								

Pada tahun 1970-an, dua ekonom lain Keith Griffin dan John Enos dalam bukunya *Foreign Assistance: Objectives and Consequences* membuktikan pinjaman luar negeri berdampak negatif pada pertumbuhan. Mereka mengajukan bukti empiris bahwa utang luar negeri berkorelasi negatif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Bantuan luar negeri telah membuat pemerintah meningkatkan pengeluaran yang mengurangi dorongan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sebagainya. Ekonom di era berikutnya juga melakukan studi yang mendukung kesimpulan Griffin dan rekannya.

M. Todaro (1998) berpendapat bahwa akumulasi utang luar negeri (external debt) merupakan suatu gejala umum yang wajar. Rendahnya tabungan dalam negeri tidak memungkinkan dilakukannya investasi secara memadai, sehingga pemerintah negara-negara berkembang harus menarik dana pinjaman dan investasi dari luar negeri. Bantuan luar negeri dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha negara yang bersangkutan guna mengurangi kendalautamanya yang berupa kekurangan devisa, serta untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya.

Menurut Anik Wahyuningsih ([anikwahyuningsih.blogspot.com](http://anikwahyuningsih.blogspot.com)), utang luar negeri menimbulkan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Utang luar negeri berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Alirannya dapat meningkatkan

pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier effect positif terhadap perekonomian, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tabungan masyarakat. Menurutnya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya.

Secara teori, menurut Supriyanto dan Sampurna AF (1999), bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (multiplier effects) yang positif pada perekonomian. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN. Ini jauh lebih baik dibandingkan membiarkan defisit APBN sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan perkapita.

Pada sisi lain, utang dapat berdampak negatif. Antara lain dapat memicu krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan, Cicilan bunga yang makin memberatkan perekonomian nasional Indonesia. Selain itu, dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (Inflasi) dan mengakibatkan ketergantungan terhadap utang dan kepentingan negara krediturnya.

Sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam Milleneum Development Goals (MDGs). Salah satu tujuan utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi separuh pada 2015. Kemudian, sebuah pertanyaan besar yang menyoal bagaimana target itu bisa terpenuhi pun mengemuka. Pertanyaan ini memang sudah sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi dan kapasitas APBN yang kurang mumpuni.

Sejatinya, utang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, Pattilo, Pairson dan Ricci pada tahun 2002, menemukan hubungan yang negatif antara utang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dari 100 negara yang diteliti, mereka menemukan kontribusi utang terhadap pendapatan perkapita suatu negara adalah negatif untuk rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang berada pada kisaran persentase 35-45%. Temuan tiga ekonom tersebut ternyata masih relevan dengan kondisi Indonesia masa kini.

Pertanyaan berikutnya, apakah tata kelola utang pada setiap rejim pemerintahan berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat banyak. Ini dapat dianalisis dengan melihat income perkapita atau PDB perkapita sebagai indikatornya. Ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi ganda dengan dummy variabel seperti terpapar dalam Tabel 6 dan Tabel 7. Tabel 6 menunjukkan pengaruh rasio Utang/PDB terhadap PDB Perkapita. Sedang Tabel 7 menggambarkan pengaruh Utang terhadap PDB Perkapita..

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rasio utang perkapita berkorelasi positif dengan angka pendapatan perkapita. Artinya semakin tinggi rasio utang terhadap PDB Indonesia cenderung meningkatkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia. Dengan kata lain bisa disimpulkan, utang selain dapat meningkatkan PDB dan menurunkan angka kemiskinan, juga dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Ini bermakna bahwa pertumbuhan produksi secara nasional secara umum dapat dikatakan cukup berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan perkapita.

Tabel 6 Pengaruh Rasio Utang/PDB terhadap Kesejahteraan Rakyat

Dependent Variable: PDBKAPITA				
Method: Least Squares				
Date: 03/20/18 Time: 15:33				
Sample: 1949 2017				
Included observations: 36				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UTANG_PDB	0.350053	0.508965	0.687774	0.4977
INFLASI01	-0.546613	0.424200	-1.288575	0.2089
PENDUDUK	0.016054	0.006682	2.402636	0.0237
ERA1	-0.330297	1.316554	-0.250880	0.8039
ERA2	-1.342218	0.797865	-1.682261	0.1045
ERA3	-2.072533	0.576570	-3.594591	0.0013
ERA4	-2.106962	0.529341	-3.980349	0.0005
ERA5	-1.917601	0.471779	-4.064615	0.0004
ERA6	-0.512492	0.377164	-1.358803	0.1859
C	-0.759488	1.892933	-0.401223	0.6915
R-squared	0.883202	Mean dependent var	1.347880	
Adjusted R-squared	0.842772	S.D. dependent var	1.309197	
S.E. of regression	0.519122	Akaike info criterion	1.756779	
Sum squared resid	7.006691	Schwarz criterion	2.196646	
Log likelihood	-21.62203	Hannan-Quinn criter.	1.910304	
F-statistic	21.84518	Durbin-Watson stat	0.800739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sementara itu, dari tabel kita dapat gambaran bahwa pendapatan per kapita dipengaruhi secara bermakna oleh jumlah penduduk serta model pembangunan era Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY. Sementara rasio utang terhadap PDB dan inflasi, serta era pemerintahan Orde Baru, Orde Habibie dan Orde Jokowi tidak berdampak nyata terhadap pendapatan per kapita.

Yang menarik, pengaruh model pembangunan pada semua orde kepemimpinan menunjukkan korelasi negatif dengan pendapatan per kapita. Ini memberi indikasi bahwa peningkatan utang luar negeri Indonesia ternyata tidak menjamin adanya peningkatan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, utang pembangunan tidak nyata berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Lebih lanjut, tingginya level utang tersebut dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi yang dapat memperbaiki kinerja ekspor. Indonesia selama beberapa periode (Orde Baru, Orde Habibie, Orde Gus Dur dan Megawati) mengalami debt to gdp ratio cukup besar, bahkan pernah menyentuh kisaran 45%-90%. Sempat menurun di masa SBY ke level 25%, tetapi kini cenderung meningkat lagi ke level 30%. Dengan berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Pattilo dkk, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa utang luar negeri mempunyai dampak yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tetapi, menurut Nugroho Pratomo & Sita Wardhani (2017), peningkatan utang yang mengikuti peningkatan belanja pemerintah masih dinilai wajar. Sebab penggunaan utang adalah untuk belanja yang bersifat produktif. Belanja infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

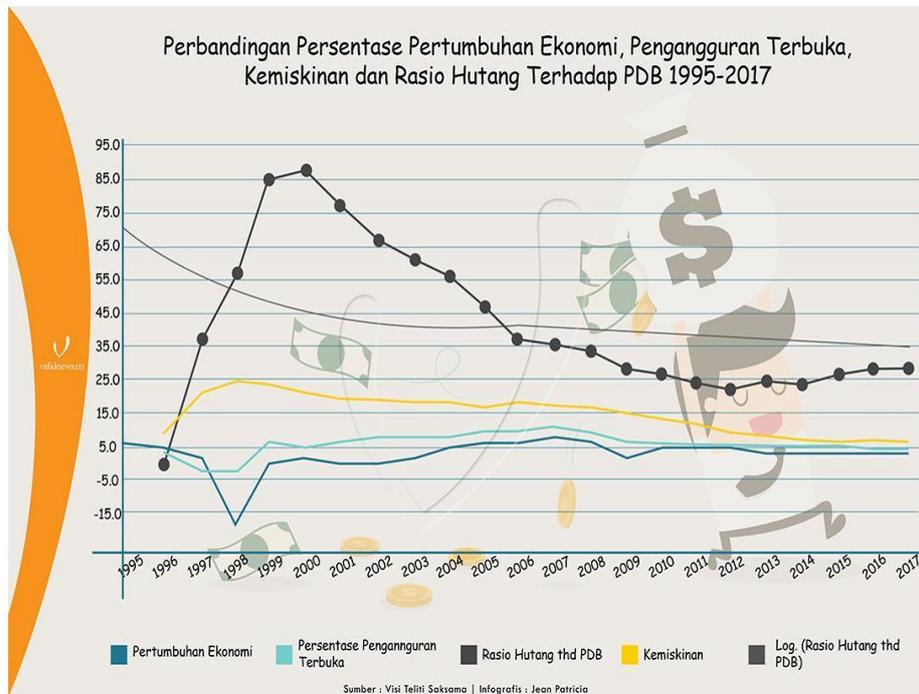
Tabel 7 Pengaruh Utang terhadap PDB Perkapita

Dependent Variable: PDBKAPITA  
 Method: Least Squares  
 Date: 03/23/18 Time: 05:19  
 Sample: 1949 2017  
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UTANG_\$	-0.001897	0.000691	-2.744218	0.0111
PDB\$	0.004209	0.000172	24.46413	0.0000
POPULASI	6.67E-10	5.41E-10	1.232895	0.2291
INFLASI	-0.000420	0.000347	-1.211511	0.2370
ERA1	-0.088264	0.143183	-0.616443	0.5432
ERA2	-0.041669	0.119705	-0.348098	0.7307
ERA3	0.042997	0.082420	0.521677	0.6065
ERA4	0.082113	0.075603	1.086104	0.2878
ERA5	0.092573	0.069822	1.325845	0.1969
ERA6	0.048940	0.063507	0.770619	0.4482
C	0.098207	0.164636	0.596512	0.5562
R-squared	0.998814	Mean dependent var	1.347880	
Adjusted R-squared	0.998339	S.D. dependent var	1.309197	
S.E. of regression	0.053351	Akaike info criterion	-2.777396	
Sum squared resid	0.071157	Schwarz criterion	-2.293543	
Log likelihood	60.99313	Hannan-Quinn criter.	-2.608518	
F-statistic	2105.155	Durbin-Watson stat	1.472524	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sementara itu, dari Tabel 7 kita mendapatkan hasil analisis statistik bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indicator PDB Perkapita ternyata hanya dipengaruhi secara nyata oleh Utang dan nilai PDB. Sementara variabel lain, seperti tingkat inflasi, jumlah penduduk dan era pemerintahan tidak berpengaruh nyata. Jumlah utang dalam semua era pemerintahan bahkan berkorelasi negatif terhadap PDB Perkapita. Sementara PDB, yang menunjukkan indikator makro pembangunan, memang berkorelasi positif.

Dalam hal mengelola utang untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat –baca peningkatan pendapatan perkapita rakyat banyak – ternyata semua era pemerintahan tidak berbeda nyata dengan tata kelola utang era Orde Lama. Artinya, selama Indonesia merdeka, sistem tata kelola utang pemerintahan belum berhasil guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Utang baru berdampak secara global terhadap peningkatan PDB dan penurunan jumlah kemiskinan secara relative, tetapi belum banyak memberdayakan masyarakat.



Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Rasio Utang/PDB

Berdasarkan grafik di atas, nampak bahwa setelah krisis 1998, dampak utang baru dirasakan justru pada tahun 1999-2000. Pada tahun 2000, rasio hutang terhadap PDB mencapai 89%. Sementara kemiskinan dan pengangguran terbuka justru menurun dibandingkan tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1999.

Namun jika dilihat trennya secara umum menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB semenjak tahun 1999-2017, menunjukkan tren penurunan sebagaimana ditunjukkan pada garis putus-putus. Sebaliknya, selama periode selama tahun 2012-2017, rasio hutang terhadap PDB kembali meningkat, namun pada saat yang bersamaan kemiskinan menunjukkan tren terjadinya penurunan. Celakanya, penurunan ini juga diikuti oleh rendahnya laju pertumbuhan ekonomi untuk periode tersebut.

Rasio utang terhadap PDB merupakan salah satu indikator yang umumnya digunakan oleh investor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ketika akan membeli SBN. Rasio ini dapat menggambarkan kemampuan negara untuk membayar utangnya. Sebab semakin kecil rasio ini, maka artinya aktifitas produksi di dalam negeri relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang. Sehingga hasil aktifitas ekonomi dalam negeri mampu untuk membayar kembali utang negara.

Batas aman rasio utang terhadap PDB pernah diterbitkan oleh IMF. Bagi negara maju rasionya adalah 80%, sedangkan bagi negara berkembang adalah

40%. Meskipun demikian, angka ini tidaklah rigid, sebab terdapat berbagai indikator lain menjadi ukuran, sehingga bisa saja sebuah negara melampaui batas tersebut, namun masih dinilai aman.

Sebagai contoh adalah Jepang. Meski rasio utang terhadap PDB mencapai

250% di tahun 2016, namun posisi Jepang masih aman, sebab inflasi sangat rendah, dan tingkat bunga mendekati nol. Dengan kenaikan inflasi saja, maka PDB nominal akan meningkat, dan rasio hutang terhadap PDB-nya akan turun (dengan asumsi utang tidak meningkat).

Dengan mengacu kepada data-data tersebut, nampak bahwa dalam memahami hutang ini, tidak dapat dilihat dengan cara terlalu menyederhanakan kesimpulan hubungan antara tingkat hutang dengan ketiga hal yang disebut pemerintah sebagai indikator kemakmuran rakyat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Utang yang besar bukan selalu berarti menunjukkan negara telah berada dalam kebangkrutan ekonomi. Sebaliknya, pihak pemerintah juga tidak dapat dengan mudah menyatakan bahwa hutang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat membawa pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam waktu yang singkat.

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Utang luar negeri memiliki korelasi dengan terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai Produksi Domestik Bruto Indonesia dan tingkat kemiskinan. Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan. Dalam hal tata kelola utang sebagai pendorong perekonomian dan kemiskinan, Era Soeharto dan Era Habibie cenderung berbeda dan lebih baik dari Era Soekarno. Sementara tatakelola utang Era Abdurrahman wahid, Era Megawati, Era SBY dan Era Jokowi tidak berbeda atau tidak lebih baik dari Era Soekarno.
2. Meski secara nasional dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (baca pendapatan perkapita). Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan riset, penulis saran rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Jokowi dan penerusnya kelak perlu belajar dari success story pengelolaan utang era pendahulunya, khususnya pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Era SBY.
2. Untuk mendapatkan hasil riset yang lebih akurat perlu penelitian lanjutan dengan data yang lebih lengkap dan parameter lebih luas.
3. Program dan kebijakan pembangunan semestinya tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga aspek pemerataan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, S. dan Sasono A. 1987. Modal asing, beban hutang luar negeri dan ekonomi indonesia. Jakarta: DI Press.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Bank Indonesia. 1970-2004. Statistik ekonomi keuangan indonesia. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2017. Statistik utang Indonesia triwulan iii 2017. Jakarta: [http://www.bi.go.id/id/statistik/suspi/Pages/SUSPI\\_TWIII\\_2017.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/suspi/Pages/SUSPI_TWIII_2017.aspx)
- Batiz FL dan Batiz LA. 1994. International finance and open economy macroeconomics. New Jersey: Prentice-Hall.
- Daryanto A. 2001. Hutang luar negeri indonesia : masalah dan alternative Solusinya. Agrimedia 7(1) :16-23.
- Departemen Keuangan. 2003. Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan Belanja negara. <http://www.depkeu.go.id/>.
- Dornbusch R dan Fischer S. 1996. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga. Esparanti, Azis MA, Zams BM dan Purubaskoro RW. 1998. Analisis beban utang luar negeri indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Faisal, Fithra. 2016. Utang luar negeri dan tingkat kemiskinan. Jakarta: Keio Initiative Forum For Better Indonesia.
- Hernatasa. 2004. Analisis Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Bogor: Tesis SPS-IPB).
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Sri Mulyani: APBN 2017 tidak sehat, utang untuk bayar utang. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3277058/rapbn-2017-tidak-sehat-sri-mulyani-kita-berutang-untuk-bayar-bunga-utang>.
- Indrawati SM. 1995. Analisis hutang luar negeri dan penanaman modal asing di indonesia. Dialog Pembangunan Politik X: 1~4.
- Djalil, Sofyan. 2016. Utang negara masih aman. <http://finansial.bisnis.com/read/20160603/9/554305/-bappenas-utang-negara-masih-sangat-aman>.
- Juoro U. 1995. Pengaruh pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Dialog Pembangunan Politik X: 1-12.
- Online Etymology Dictionary . Debt. [www.etymonline.com](http://www.etymonline.com). Retrieved 20 May 2017
- Pattillo C, Poirson H dan Ricci L. 2002. External debt and growth. International Monetary Fund Working Paper 69: 1-47.
- Pratomo, Nugroho; & Wardhani, Sita. 2017. Utang dan pertumbuhan ekonomi. <http://validnews.co/-utang-dan-pertumbuhan-ekonomi-v0000231>.
- Rachbini DJ. 2001. Ekonomi politik utang. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saputra RD dan Wibowo DM. 2001. Perkembangan pinjaman luar negeri Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sudiro dan Sumarkoco. 1987. Bantuan Luar Negeri Sebagai Penunjang Pembangunan. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sugema I. 2001. Utang luar negeri good time friend, bad time enemy. Agrimedia 7(1) :30-35.

- Supriyanto dan Sampurna AF. 1999. Utang luar negeri indonesia: argumen, relevansi dan implikasinya bagi pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Swasono SE dan Arief S. 1999. Pembangunan tanpa utang: utang luar negeri dan ekonomi indonesia. Republika, 15 Desember 1999.
- Todaro MP. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Usman, Hardius; Nachrowi, D.N. 2006. Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Wahyuningsih, Anik. 2013. Pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. <http://anikwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/02/pengaruh-utang-luar-negeri-terhadap.html>
- World Bank. 2017/2018. World debt table. <https://data.worldbank.org/country-/indonesia>